

## **Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di 34 Provinsi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2018-2022**

**Vivilia Anggraini<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf Bahtiar<sup>2</sup>, Budimansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung

E-mail : viviliaanggrainii@gmail.com

### **Abstrak**

Ketimpangan pendapatan di Indonesia relatif mengalami penurunan disetiap tahun nya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan ketimpangan pendapatan per Provinsi dimana, angka ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh Aglomerasi Industri yang tidak merata, Indeks Pembangunan Manusia yang tidak memadai serta besaran Upah Minimum Provinsi yang rendah. Metode dalam penelitian ini menggunakan peneledakan kuantitatif dengan analisis data panel. Adapun analisis data panel yang terdiri dari uji pemilihan model dengan uji Chow, Hausman dan LM. Setelah itu menggunakan uji asumsi klasik, uji t, uji f dan uji R<sup>2</sup>. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Populasi pada penelitian ini yaitu 34 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi industri tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia. Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia. Secara bersama-sama aglomerasi industri, indeks Pembangunan manusia dan upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia.

**Kata kunci** : Aglomerasi Industri, IPM, ketimpangan pendapatan, upah minimum

### **Pendahuluan**

Ketimpangan pendapatan mengacu pada betapa tidak meratanya distribusi pendapatan di seluruh populasi. Semakin tidak meratanya distribusi, semakin besar ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sering kali disertai dengan ketimpangan kekayaan, yaitu distribusi kekayaan yang tidak merata (Amri, 2017). Ketimpangan pendapatan dapat dibagi dengan berbagai cara untuk menunjukkan tingkat dan bentuk ketimpangan pendapatan yang berbeda, seperti ketimpangan pendapatan berdasarkan gender atau ras. Berbagai ukuran, seperti Indeks Gini, dapat digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antara lain yaitu Globalisasi, Kemajuan Teknologi, pendidikan, kondisi ekonomi dan perpajakan (Wibowo, 2016).

Ketimpangan pendapatan dapat dianalisis melalui berbagai segmentasi. Distribusi pendapatan berdasarkan segmentasi demografi menjadi dasar untuk mempelajari ketimpangan pendapatan dan disparitas pendapatan. Berbagai jenis segmentasi pendapatan yang dipelajari ketika menganalisis ketimpangan pendapatan dapat mencakup jenis kelamin, gender, lokasi geografis, pekerjaan dan pendapatan historis (Mahardiki & Santoso, 2013).

Koefisien Gini didasarkan pada perbandingan proporsi kumulatif penduduk terhadap proporsi kumulatif pendapatan yang mereka terima, dan berkisar antara 0 jika terjadi kesetaraan sempurna dan 1 jika terjadi ketimpangan sempurna. S80/S20 adalah rasio pendapatan rata-rata 20% masyarakat terkaya dan 20% masyarakat termiskin; P90/P10 adalah perbandingan nilai batas atas desil kesembilan (yaitu 10% penduduk dengan pendapatan tertinggi) terhadap nilai batas atas desil pertama; P90/P50 dari nilai batas atas desil kesembilan terhadap pendapatan median; dan P50/P10 pendapatan median terhadap nilai batas atas desil pertama. Rasio Palma adalah bagian dari seluruh pendapatan yang diterima oleh 10% penduduk dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan tertinggi dibagi dengan bagian dari seluruh pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan terendah (Oksamulya & Anis, 2020).

**Tabel 1.** Data Ketimpangan Pendapatan Per Provinsi Tahun 20218- 2022.

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	0,318	0,321	0,319	0,323	0,291
Sumatra utara	0,311	0,315	0,314	0,313	0,326
Sumatra Barat	0,305	0,307	0,301	0,3	0,292
Riau	0,347	0,331	0,329	0,327	0,323
Jambi	0,335	0,324	0,316	0,315	0,335
Sumatra Selatan	0,341	0,339	0,338	0,34	0,33
Bengkulu	0,355	0,329	0,323	0,321	0,315
Lampung	0,326	0,331	0,32	0,314	0,313
Kep. Bangka Belitung	0,272	0,265	0,257	0,247	0,255
Kep. Riau	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325
DKI Jakarta	0,39	0,391	0,4	0,411	0,412
Jawa Barat	0,405	0,398	0,398	0,406	0,412
Jawa Tengah	0,357	0,358	0,359	0,368	0,366

DI Yogyakarta	0,422	0,428	0,437	0,436	0,459
Jawa Timur	0,371	0,364	0,364	0,364	0,365
Banten	0,367	0,361	0,365	0,363	0,377
Bali	0,364	0,37	0,369	0,375	0,362
NTB	0,391	0,374	0,386	0,384	0,374
NTT	0,359	0,355	0,356	0,339	0,34
Kalimantan Barat	0,325	0,318	0,325	0,315	0,311
Kalimantan Tengah	0,344	0,335	0,32	0,32	0,309
Kalimantan Selatan	0,34	0,334	0,351	0,325	0,309
Kalimantan Timur	0,342	0,335	0,335	0,331	0,317
Kalimantan Utara	0,304	0,292	0,3	0,285	0,27
Sulawesi Utara	0,372	0,376	0,368	0,359	0,359
Sulawesi Tengah	0,317	0,33	0,321	0,326	0,305
Sulawesi Selatan	0,388	0,381	0,382	0,377	0,365
Sulawesi Tenggara	0,392	0,393	0,388	0,394	0,366

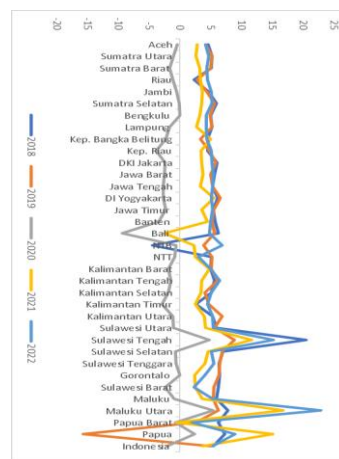
Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2022. Pada awalnya di tahun 2018 sebesar 0,389 mengalami penurunan hingga 0,380 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,005 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 sampai 2022 kembali menurun sebesar 0,004 yaitu menjadi 0,381. Ketidakmerataan sumber daya tercermin pada konsentrasi kegiatan industri yang terjadi pada daerah tertentu saja. Daerah- daerah dimana konsentrasi kegiatan industri terjadi memperoleh manfaat yang disebut dengan ekonomi aglomerasi (agglomeration economies). Sebagai akibatnya daerah-daerah yang termasuk dalam aglomerasi dan daerah-daerah yang tidak termasuk aglomerasi mengalami perbedaan pendapatan hal ini dapat mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan di setiap daerah yang tergolong aglomerasi dan daerah yang bukan aglomerasi.

Aglomerasi itu terjadi, salah satunya dikarenakan sifat manusia sebagai makhluk sosial akan cenderung berusaha untuk mencapai tujuannya dengan prinsip pemusatan (aglomerasi) di dalam permukiman mereka. Aglomerasi itu sendiri merupakan faktor

lokasi yang amat penting, baik yang berwujud pengelompokan industri, perumahan, pemusatan pertokoan di pusat perbelanjaan, sama-sama menjadi sarana utama untuk meningkatkan efisiensi ekonomis ataupun kepuasan sosial, karena di situ terjadi timbunan kegiatan manusia di suatu lokasi tertentu. Pemusatan kegiatan ekonomi akan memberikan dampak kepada wilayah yang memiliki aktivitas perekonomian berlangsung. Pengaruh atau dampak tersebut dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung serta dapat berupa dampak positif yang membawa keuntungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah lebih cepat, penyediaan lapangan kerja akan ikut serta meningkat, sehingga tenaga kerja yang diminta mengalangi meningkaan sesuai dengan permintaan dari harus sikap lilim dan negatif yang menimbulkan biaya dan atau kerugian sosial juga berupa ketimpangan antar wilayah. Aglomerasi indutri dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi. (Tilaar, 2010).

**Gambar 1.** PDRB Sektor Industri 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2022



Perkembangan industri di Indonesia melalui data PDRB di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan yang sangat drastis. Walaupun pada tahun 2022 kembali naik dari dua tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun itu tetap tidak dapat lebih tinggi dari tahun 2018, hal ini dapat terjadi karna banyak faktor, salah satunya karna dipengaruhi oleh perubahan kegiatan pada ekspor dan impor.

Dari gambar diatas dapat kita lihat seberapa banyaknya perusahaan-perusahaan industri yang terus berkembang. Selama lima tahun terakhir perusahaan perusahaan industri di indonesia mengalami fase naik dan turun hingga sampai pada tahun 2022 perusahaan mikro di indonesia naik kembali dari dua tahun sebelumnya yaitu mencapai 4.122.869 perusahaan dan perusahaan industri kecil pula naik dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 216.359.

Namun, keberhasilan pembangunan manusia tidak lepas dari kinerja peran pemerintah untuk membuat regulasi guna mencapai tatanan sosial. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari

angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purchasing power parity (ppp) index.

**Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi**

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	71,18	71,90	71,99	72,18	72,80
Sumatra Utara	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71
Sumatra Barat	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26
Riau	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52
Jambi	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14
Sumatra Selatan	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90
Bengkulu	70,64	71,21	71,40	71,64	72,16
Lampung	69,02	69,57	69,69	69,90	70,45
Keb. Bangka Belitung	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24
Kepulauan Riau	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46
DKI Jakarta	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65
Jawa Barat	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12
Jawa Tengah	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
DI Yogyakarta	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64
Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
Banten	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32
Bali	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44
NTB	67,30	68,14	68,25	68,65	69,46
NTT	64,39	65,23	65,19	65,28	65,90
Kalimantan Barat	66,98	67,65	67,66	67,90	68,63
Kalimantan Tengah	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63
Kalimantan Selatan	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84
Kalimantan Timur	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44
Kalimantan Utara	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83

Sulawesi Utara	72,20	72,99	72,93	73,30	73,81
Sulawesi Tengah	68,88	69,50	69,55	69,79	70,28
Sulawesi Selatan	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
Sulawesi Tenggara	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23
Gorontalo	67,71	68,49	68,68	69,00	69,81
Sulawesi Barat	65,10	65,73	66,11	66,36	69,92
Maluku	68,87	69,45	69,49	69,71	70,22
Maluku Utara	67,76	68,70	68,49	68,76	69,47
Papua Barat	63,74	64,70	65,09	65,26	65,68
Papua	60,06	68,84	60,44	60,62	61,39
<b>Indonesia</b>	<b>71,39</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>	<b>72,91</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap wilayah berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lain, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan efek spasial atau yang disebut heterogenitas spasial. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Hasibuan et al., 2023).

Upah pekerja dalam jangka panjang akan memiliki kemampuan yang semakin sedikit dalam membeli barang, dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini terjadi akibat naiknya harga-harga barang, dan jasa tersebut. Kenaikan tersebut akan menurunkan daya beli dari upah. Pada hakekatnya, harga barang dan upah akan selalu naik, dan yang menjadi masalah adalah naiknya tidak serentak dan juga besarnya tidak sama besar. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana upah akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga dalam hal ini tingkat upah perlu disesuaikan dengan kenaikan harga barang agar daya beli upah pekerja akan meningkat.

**Tabel 3.** Data UMP 34 Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nanggroe Aceh	2.700.000	2.916.810	3.165.031	3.165.031	3.166.460
2.	Sumatra Barat	2.119.067	2.289.228	2.484.041	2.484.041	2.742.467
3.	Sumatra Utara	2.132.189	2.303.403	2.499.423	2.499.423	2.522.610
4.	Sumatra Selatan	2.595.995	2.804.453	3.043.111	3.144.446	3.144.446

5.	Lampung	2.074. 673	2.241. 270	2.432. 001	2.432. 001	2.440. 486
6.	Riau	2.464. 154	2.662. 026	2.888. 564	2.88.5 64	2.938. 564
7.	Kepulauan Riau	2.563. 875	2.769. 754	3.005. 460	3.005. 460	3.050. 172
8.	Jambi	2.243. .718	2.243. 718	2.630. 162	2.630. 162	2.698. 940
9.	Bangka Belitung	2.755. 444	2.976. 706	3.230. 023	3.230. 023	3.264. 884
10.	Bengkulu	1.888. 000	2.040. 407	2.213. 604	2.215. 000	2.238. 094
11.	DKI Jakarta	3.648. 036	3.940. 973	4.267. 349	4.416. 186	4.641. 854
12.	Banten	2.099. 385	2.267. 990	2.460. 996	2.460. 996	2.501. 203
13.	Jawa Barat	1.544. .360	1.668. 373	1.810. 351	1.810. 351	1.841. 487
14.	Jawa Tengah	1.486. 065	1.605. 396	1742. 015	1.798. 979	1.812. 935
15.	Jawa Timur	1.508. 894	1.630. 059	1.768. 000	1.765. 000	1.891. 567
16.	DIY Yogyakarta	1.454. 154	1.570. 923	1.704. 608	1.686. 777	1.840. 915
17.	Bali	2.127. 157	2.297. 969	2.493. 532	2.494. 000	2.516. 971
18.	NTB	1.825. 000	2.012. 610	2.183. 000	2.183. 883	2.207. 212
19.	NTT	1.660. 000	1.795. 000	1.950. 000	1.950. 000	1.975. 000
20.	Kalimantan Barat	2.046. 000	2.211. 266	2.399. 698	2.399. 698	2.434. 328
21.	Kalimantan Selatan	2.454. 671	2.651. 781	2.877. 448	2.877. 448	2.906. 473
22.	Kalimantan Tengah	2.421. 305	2.615. 736	2.890. 093	2.903. 144	2.922. 516
23.	Kalimantan Timur	2.543. 331	2.747. 560	2.981. 378	2.981. 378	3.014. 738
24.	Kalimantan Utara	2.559. 903	2.765. 463	3.000. 803	3.000. 804	3.016. 738
25.	Sulawesi Barat	2.193. 530	2.369. 670	2.571. 328	2.678. 863	2.678. 863
26.	Sulawesi Tenggara	2.177. 052	2.351. 869	2.552. 014	2.552. 014	2.710. 595

27.	Sulawesi Selatan	2.647.767	2.860.383	3.103.800	3.165.876	3.165.876
28.	Sulawesi Tengah	1.965.232	2.123.040	2.303.710	2.303.711	2.390.739
29.	Sulawesi Utara	2.824.286	3.051.076	3.310.722	3.310.723	3.310.723
30.	Gorontalo	2.206.813	2.384.020	2.586.900	2.788.826	2.800.580
31.	Maluku	2.222.220	2.400.664	2.604.960	2.604.961	2.619.312
32.	Maluku Utara	2.320.803	2.508.092	2.721.530	2.721.530	2.862.231
33.	Papua	2.895.650	3.128.171	3.516.700	3.516.700	3.561.932
34.	Papua Barat	2.667.000	2.881.160	3.184.225	3.134.600	3.200.000

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang syarat dengan nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data dilapangan. Dalam analisis data, metode penelitian kuantitatif memerlukan bantuan perhitungan ilmu statistik, baik statistik deskriptif maupun inferensial (yang menggunakan rumus-rumus statistik non-parametrik) (Amala & Budimansyah, 2021). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (sampling jenuh) atau dapat diartikan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pada penentuan sampling ini berdasarkan pada 34 provinsi yang memberikan informasi data ketimpangan pendapatan inklusif setiap tahunnya. Jadi sampel dari penelitian ini 34 provinsi di Indonesia dengan kurun waktu 2021-2022, dan Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan metode kuantitatif menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai alat pengujian hipotesa menggunakan program `eviesw10`.

**Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

**Hasil Penelitian**

**Uji Chow**

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model yang paling tepat antara model common effect dan model fixed effect yang akan digunakan untuk regresi data panel (Salma & Deyi, 2024).



**Tabel 4.** Hasil Uji Chow

Effect Test	Signifikansi
Cross-section F	0,0000
Cross-section Chi-square	0,0000

Sumber Data: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari cross-section chi-square sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hal ini berarti menurut uji chow, estimasi model yang tepat digunakan untuk regresi data panel adalah fixed effect model.

**Uji Hausman**

**Tabel 5.** Hasil Uji Hausman

Test Summary	Signifikansi
Cross-section random	0.3360

Sumber Data: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari cross-section random sebesar  $0,3360 > 0,05$ . Maka model yang terpilih dalam uji hausman ini adalah Random Effect Model. Oleh karena itu pengujian dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk memilih antara model Common Effect Model dan Random Effect Model.

**Uji LM**

Berikut hasil untuk uji LM Test:

**Tabel 6.** Hasil Uji LM Test

Effect Test	Signifikansi
Cross-section-one-sided	0,0000

Sumber Data: Output Eviews 10, 2024

Tabel diatas menunjukkan Prob. Breusch Pagan sebesar  $0,40 < 0,05$ , berdasarkan hasil tersebut maka model yang terpilih adalah random effect model.

**Tabel 7.** Rekapitulasi Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.
AG	-0.000386	-1.916890	0.0570
IPM	-0.000931	-1.046346	0.2969
UMP	-1.47E-08	-3.571223	0.0005
C R-squared	99,29879	7.527318	0.0000
		0.113797	
F-Statistic	7.105339		
Prob.(F-statistic)	0.000161		

Sumber Data : Output Eviews 10, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari tiga pengujian yang sudah dilakukan, model

CEM yang terbaik, maka dari itu untuk melakukan analisis regresi bisa menggunakan model common effect model (CEM).

**Uji Hipotesis**

Uji T (Uji Parsial)

Berikut adalah Hasil Uji t :

**Tabel 8.** Hasil Uji T

Variabel	T-Statistic	Prob	Hasil
AG	-1.916890	0.0570	H1 Ditolak
IPM	-1.046346	0.2969	H2 Ditolak
UMP	-3.571223	0.0005	H3 Diterima

Sumber Data : Data diolah menggunakan Eviews 10, 2024

Variabel AG memiliki nilai t-Statistic sebesar - 1,9168 dengan nilai Prob. (signifikasi) sebesar 0,0570 (>0,05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel AG tidak berpengaruh terhadap Variabel Ketimpangan Pendapatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa berapa pun nilai atau besaran dari aglomerasi industry tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Variabel IPM memiliki t-Statistic sebesar -1,0463 dengan nilai Prob. (Signifikasi) sebesar 0,02969 (>0,05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel IPM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Variabel UMP memiliki t-Statistic sebesar - 3,5712 dengan nilai Prob. (Signifikasi) sebesar 0.00 (<0,05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Variabel Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil tersebut, upah minimum mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, naik turun nya upah minimum dapat mempengaruhi besaran ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia.

**Uji F (Uji Simultan)**

Berdasarkan hasil output EViews yang ditunjukkan tabel 7, nilai probabilitas (prob) yaitu sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga menandakan bahwa AG, IPM dan UMP secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

**Uji Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil regresi data panel yang disajikan pada Tabel 4.8, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,113797. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 11% variasi dalam Ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model ini, yaitu Aglomerasi Industri (AG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum (UMP). Sisanya sekitar 89% dari variasi ketimpangan pendapatan belum dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, dan kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil pada uji hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dibahas dan diinterpretasikan sebagai berikut:

Aglomerasi Industri Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada 34 Provinsi Di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 7, didapatkan nilai koefisien sebesar -0,003 dengan nilai signifikansi (Prob) sebesar 0,057 atau lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel aglomerasi industri berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Meskipun tidak memiliki pengaruh yang signifikan namun koefisiennya kecil dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yaitu sebesar 0,003, artinya kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tidak terlalu berdampak kepada penurunan angka ketimpangan antar provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian ini menolak H1 dan tidak sesuai dengan penelitian terdahulu. Namun sejalan dengan penelitian Agnesa tahun 2022 aglomerasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Dimana Aglomerasi bersifat backwash effect karena daerah yang memiliki spasial ekonomi yang tinggi akan bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan spasial ekonomi rendah. Di Indonesia sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertama bagi PDB sebesar 18,34% tahun 2022. Meskipun sektor industri menjadi sektor dengan penyumbang PDB terbesar, namun tidak semua wilayah di Indonesia memiliki sektor industri yang besar. Kebanyakan industri di Indonesia ada di pulau Jawa. Berdasarkan hasil penelitian Agnesia tahun 2022 dengan hasil variabel aglomerasi ekonomi ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, namun secara tidak langsung konsentrasi kegiatan ekonomi ini memberikan dampak terhadap naik turunnya ketimpangan pendapatan antar daerah Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hubungan antara aglomerasi dengan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari besarnya rasio PDRB kabupaten/Kota terhadap PDRB total di Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi, hal ini disebabkan kondisi di setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda-beda (Agnesia Marytha Christyoningrum, 2022).

Ketidakterataan sentra industri di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aglomerasi industri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Banyak faktor yang membuat aglomerasi industri di Indonesia belum merata, dimana ada perbedaan biaya transportasi dan perbedaan biaya upah. Produsen cenderung memilih lokasi industri yang memiliki tingkat upah tenaga kerja yang lebih rendah untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan.

Adapun ketidakmerataan aglomerasi disebabkan oleh potensi di setiap Provinsi yang bervariasi, misalnya seperti hasil penelitian Wella Amalia tahun 2023 dimana Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk wilayah SWP VII Kediri rata-rata bukan melalui sektor manufaktur, namun mayoritas masyarakat bekerja di pertanian, perkebunan dan kehutanan. Seperti misalnya pertumbuhan sektor manufaktur seperti industri pabrik tembakau yang beroperasi besar di Kota Kediri tidak terlalu memberikan efek besar terhadap petani tembakau di wilayah SWP VII Kediri karena rendahnya harga jual tembakau yang tidak seimbang dengan harga beli olahan tembakau. Sehingga

adanya aglomerasi tidak memberikan manfaat untuk industri bagi petani tembakau di wilayah *h i n t e r l a n d*. (Amalia, 2023)

Agglomerasi sangat berkaitan dengan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung tersebut antara lain transportasi, ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian yang beraneka ragam dan pelayanan dari pemerintah. Selain itu, adapun sektor pertanian yang penyebarannya lebih merata dan menyumbang 12,40% untuk PDB pada tahun 2022, dimana sektor pertanian lebih merata penyebarannya di seluruh provinsi di Indonesia dibandingkan dengan sektor industri.

### **Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada 34 Provinsi Di Indonesia.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,29 atau lebih besar dari 0,05. Besaran koefisien yang sangat kecil membuat pengaruh IPM tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini menolak H2 dan tidak sejalan dengan penelitian terdahulu. Namun, berdasarkan penelitian Ismanaya tahun 2023, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau jawa tahun 2017-2022. Hasil tersebut mendukung penelitian ini dimana, kenaikan dan penurunan indeks pembangunan manusia tidak serta merta pengaruhnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek.

Berdasarkan tahun penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Peneliti menganggap bahwa dampak pengukuran indeks pembangunan manusia ini tidak secara langsung dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Indeks pembangunan manusia diukur dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan pendapatan riil perkapita. Ketiga faktor tersebut dapat tidak efektif jika menggunakan indikator yang sudah tidak tepat. Misalnya, angka melek huruf sudah tidak relevan untuk mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

Adapun berdasarkan penelitian Pradnya devi tahun 2017 dengan hasil variabel IPM tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Khanza, 2014). Dalam hal ini disebutkan bahwa IPM yang tinggi tidak menjamin dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Muhammad Ersad tahun 2022 dimana IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena di Sumatera Bagian Selatan sektor yang paling besar berkontribusi terhadap PDRB adalah sektor pertanian, kemudian diikuti sektor pertambangan dan di urutan ketiga adalah sektor industri, dalam kegiatan produksi ketiga sektor tersebut tidak membutuhkan pekerja dengan IPM tinggi namun dalam kegiatan produksi sektor tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar, sehingga tingkat IPM tidak mempengaruhi pendapatan perkapita di Sumatera Bagian Selatan. (Ersad et al., 2022)

Berdasarkan data badan pusat statistik, indeks Pembangunan manusia relative stabil dan terus meningkat. Hasil tersebut tidak sejalan dengan naik turunnya angka ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil tersebut mengidentifikasi bahwa indikator

**Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics**

dari IPM tidak secara langsung berpengaruh dengan aspek distribusi pendapatan di Indonesia sepanjang tahun 2018 - 2022 .

### Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada 34 Provinsi Di Indonesia

Hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -3,571 dan nilai signifikansi (prob) sebesar 0,00. Artinya, setiap kenaikan upah minimum dapat menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 3,571. Dampak signifikan dari upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan membuat variabel ini mempunyai hubungan yang kuat antara satu sama lain.

Hasil penelitian ini menerima H3 dan sesuai dengan penelitian terdahulu. Menurut ulandari tahun 2022, kenaikan maupun penurunan upah minimum akan menyebabkan kenaikan dan penurunan dari sisi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menjadi tolak ukur dalam menentukan Langkah untuk tercapainya penghasilan yang layak untuk terciptanya kesejahteraan para pekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan Upah minimum provinsi (UMP) pada 34 provinsi di Indonesia tidak mengalami kenaikan yang berarti. Hal tersebut dibarengi dengan naik turunnya angka ketimpangan pendapatan yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Upah dianggap dapat memberi pengaruh pada rangsangan daya konsumsi bagi masyarakat dalam sisi demand barang maupun jasa. Ketika upah sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu, maka ketimpangan pendapatan akan dapat diatasi.

Upah sebagai kompensasi yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan, tidak hanya mencerminkan nilai kerja tetapi juga menjadi elemen penting dalam keseimbangan kehidupan pekerja. Dalam buku Labor Economics: Principles in Practice oleh Kenneth G. Langdon, upah juga dibahas sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan upah merupakan penghasilan yang digunakan oleh pekerja untuk dapat bertahan hidup. Besaran upah dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam roda perekonomian.

Adapun hasil penelitian dari wayan tahun 2024 Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya upah minimum maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sistem pengupahan adalah kerangka yang digunakan untuk mengatur dan menetapkan upah agar kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan. Dengan meningkatnya kesesuaian upah terhadap kebutuhan hidup, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal, diharapkan bahwa kesejahteraan pekerja akan meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, sistem pengupahan berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Mudana & Purbadharmaja, 2024)

Ketimpangan pendapatan terjadi akibat upah yang stagnan atau tidak mengalami kenaikan. Dalam tabel 1.3 dijabarkan bahwa upah minimum regional di Indonesia relatif rendah dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2018-2022 .

## Aglomerasi Industri, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada 34 Provinsi Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan uji F (Simultan) diperoleh hasil Prob (F- statistik) sebesar  $0,00 < 0,05$ . Dengan F-statistik sebesar 7.105339. Artinya, aglomerasi industri, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menandakan bahwa  $H_4$  diterima, dan sesuai dengan penelitian terdahulu.

Dalam Gagasan Kuznets ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal Pembangunan. Pembangunan manusia dan upah berkaitan erat dengan ketimpangan pendapatan adapun dalam Kurva Kuznets menyebutkan jangka pendek menggambarkan korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, artinya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian Ismanaya tahun 2023 menundukung penelitian ini, dimana aglomerasi industri, indeks pembangunan manusia dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian ini. Dimana, dalam teori kurva U terbalik dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang mencakup aglomerasi industri, adapun Pembangunan manusia dan upah. Semakin tinggi peningkatan ketiga variabel tersebut dapat berdampak secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam Islam, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi. Prinsip-prinsip ini dapat mendorong pemerataan kesempatan ekonomi bagi semua anggota masyarakat. Beberapa konsep dalam Islam yang dapat membantu mengatasi ketimpangan pendapatan, di antaranya: Kewajiban membayar zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, Warisan, Hadiah, Hibah (Sodiq, 2016) Allah tidak membuat sesuatu ketentuan kecuali yang sesuai dengan hikmah, dapat mewujudkan maslahat menjadi kenyataan karenanya pula apa yang dibolehkan-Nya, maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang diharamkan-Nya maka itu adalah merusak dan kotor atau jelek. Firman Allah

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ ( الانبياء / 21 : 107 ) ﴾

Artinya :

*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam . ( Al - Anbiya ' / 21 : 107 )*

### Kesimpulan

Simpulan dari hasil penelitian "Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di 34 Provinsi Indonesia Dalam Persepektif Ekonomi Islam Tahun 2018-2022" adalah:

1. Aglomerasi Industri terhadap Ketimpangan Pendapatan: Meskipun aglomerasi

industri berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi industri di Indonesia, yang lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Faktor biaya transportasi dan upah menjadi alasan utama mengapa aglomerasi industri tidak secara signifikan mengurangi ketimpangan antar provinsi.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan: IPM memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, namun tidak signifikan. Pengaruh IPM yang kecil mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan indikator yang ada (seperti angka melek huruf) untuk menggambarkan kualitas pendidikan secara utuh dan dampak jangka pendek terhadap distribusi pendapatan.
3. Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan: Upah minimum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kenaikan upah minimum yang lebih tinggi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, namun di Indonesia, upah minimum yang stagnan sejak 2018-2022 menunjukkan bahwa perubahan dalam upah minimum belum cukup untuk mengatasi ketimpangan secara signifikan.
4. Aglomerasi Industri, IPM, dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Secara simultan, aglomerasi industri, IPM, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, diperlukan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti zakat, sedekah, dan distribusi kekayaan yang adil.
5. . Dalam Islam, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi. Prinsip-prinsip ini dapat mendorong pemerataan kesempatan ekonomi bagi semua anggota masyarakat. Beberapa konsep dalam Islam yang dapat membantu mengatasi ketimpangan pendapatan, di antaranya: Kewajiban membayar zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, Warisan, Hadiah, Hibah.

### Daftar Pustaka

- Amalia, Wella, „Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi Pada Satuan Wilayah Pengembangan (Swp) Vii Kediri Tahun 2015-2020“, 6.3 (2023), 166-80
- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, „Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian“, PILAR, 14.1 (2023), 15-31
- Amri, Khairul, „Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan: Data Panel 8 Provinsi Di Sumatera“, Jurnal EMT Kita, 1.1 (2017), 1-11
- Anggriawan, Satria Yuda, Aris Soelistyo, and Dwi Susilowati,
- Aprilianti, Vinni, and Asti Harken, „Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jambi“, Jurnal Khazanah Intelektual, 5.2 (2021), 1142-60
- Ariadi, Verry Noval, and M Muzdalifah, „Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kalimantan Selatan“, JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 3.2 (2020), 485-99

- Arif Nurianto. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung : Alfabeta 2010. Baltagi, Badi Hani. *Econometric Analysis of Panel Data*. Berlin:
- Arif, Muhammad, and Rossy Agustin Wicaksani, „Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya“, URECOL, 2017, 323–28
- Arini, Novia Putri Arini, „Analisis Aglomerasi Industri Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur/NOVIA PUTRI ARINI“ (Universitas Negeri Malang, 2021)
- Arka, Sudarsana, and I Komang Oka Artana Yasa, „Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali“, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8.1 (2015), 44328
- Baca: *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 27.1 (2012), 7–14 Sungkar, Sari Nurmalisa, and Muhammad Nasir Nazamuddin,
- Basuki, Agus Tri. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali, 2017.
- Biørn, Erik, *Econometrics of Panel Data: Methods and Applications*
- Brooks, Chris. *Introductory Econometrics for Finance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Caraka, Rezzy Eko, and Hasbi Yasin. *Spatial Data Panel*. Jawa Timur: Wade Group, 2017.
- Charysa, Ninda Noviani, „Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011“, *Economics Development Analysis Journal*, 2.4 (2013)
- Chrisetyoningrum, Agnesa Marytha, „Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Jumlah Penduduk
- Chrisetyoningrum, Agnesia Marytha, „Penduduk Terhadap Tingkat Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten / Kota Di Provinsi“, 11 (2022), 57–66
- Chusna, Ferichatul, „Indeks Pembangunan Manusia: Pengertian Dan Cara Mengukurnya“, InvestBro.Id, 2022
- Dahlan, Ahmad, „Defenisi Populasi Pengertian Sampel Dan Teknik Sampling Dalam Penelitian Pendidikan Dan Behavioral“, 2022
- Damaryanti, Henny, Sy Abdullah Alkadrie, and Annurdi Annurdi, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa“, 2022
- Djollong, Andi Fitriani, „Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif“,
- Ersad, Muhamnad Ersad, Amri Amir, and Zulgani Zulgani, „Dampak IPM, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Bagian Selatan“, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17.2 (2022), 425–38
- Fajarwati, Diana, „Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumusan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2010“, *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi*, 2.1 (2011), 1–14
- Febriansyah, Beny, „Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera“ (IAIN Padangsidimpuan, 2020)



- Febriyani, Annisa, and Ali Anis, „Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia“, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3.4 (2021), 9-16
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018)
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- Hasibuan, Siti Rama, Isnaini Harahap, and Khairina Tambunan, Hendarmin, Hendarmin, „Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat“, *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 6.2 (2019), 245-71
- Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah, 3.2 (2015) Takhim, Muhamad, „Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan
- Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia“, *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2.2 (2022), 169-82
- Ismanaya, „Analisis Determinan Ketimpangan Di Pulau Jawa Tahun 2017-2022“, *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104-16
- Istiqra: *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2.1 (2014) Effendi, Jaenal, „Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam
- Janna, Nilda Miftahul, „Variabel Dan Skala Pengukuran Statistik“, 2020
- Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20.2 (2016), 111-32 Yoertiara, Ratiarum Fatika, „Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM,
- Khaeni, Siti Naeni Nur, „Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia“ (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Khanza, Adinda, „IPM Tidak Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Pendapatan Karena Di Sumatera Bagian Selatan Sektor Yang Paling Besar Berkontribusi Terhadap PDRB Adalah Sektor Pertanian, Kemudian Diikuti Sektor Pertambangan Dan Diurutan Ketiga Adalah Sektor Industri, Dalam Ke“, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 2014
- Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, and Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Deepublish, 2020)
- Lala, Axel J, Amran T Naukoko, and Hanly F Dj Siwu, „Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-Kota Di Provinsi Sulawesi Utara)“, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23.1 (2023), 61-72
- Lestari, Fitri Yuni, *Analisis Pengaruh Aglomerasi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung*“ (Universitas Lampung, 2022)

- Litwin, Benjamin S, „Determining the Effect of the Minimum Wage on Income Inequality“, 2015
- Mahardiki, Doni, and Rokhedi Priyo Santoso, „Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar
- Makasenda, Junine Vebry, Markus Kaunang, and Ismail Rachman, Makipantung, Ryan O, Een N Walewangko, and Audie O Niode, Masfila, Dahlia, „Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2020“ (Universitas Islam Indonesia, 2022)
- Maswar, „Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa Dengan Program SPSS 23 & Eviews 8.1“, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1.2 (2017), 273-92
- Masyarakat“, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10.2
- Mirza, Denni Sulistio, „Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009“, *Economics Development Analysis Journal*, 1.2 (2012)
- Mudana, I Wayan Eva, and Ida Bagus Putu Purbadharmaja, „Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali“, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7.3 (2024), 9601-12
- Muqorrobin, Moh, „Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur“, *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5.3 (2017)
- Nasruddin, Nasruddin, and Nor Aufa Azizah, „Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Negara ASEAN“, *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 3.1 (2022), 45-56
- Nilasari, Aprillia, and Rizky Amelia, „Pengaruh PDRB Per Kapita,
- Nisa, Khoirun, Ayu Wulandari, and Rini Luciani Rahayu, „Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2018“, *Sorot*, 15.1 (2020), 55-63
- Nurtiyas, Febrika, „Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014“, *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 5.2 (2016), 166-75
- Oksamulya, Aufa, and Ali Anis, „Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia“, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2.2 (2020), 19-24
- Pandjaitan, Dorothy Rouly Haratua, and Ahmad Aripin. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017.
- PENGOLAHAN DATA EIEWS“, *Binus University*, 2021
- Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu)“, 2005, 2
- Priadana, M Sidik, and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif Propinsi Di Indonesia 2006-2011*“, *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6.2 (2013)
- Puspitaningtyas, Zarah, and Agung Widhi Kurniawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

- Razaq, Abd, and Fahyumi Rahman, „Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Ketersediaan Lahan Permukiman“, *Media Komunikasi FPIPS*, 16.1 (2017), 11-15
- Ridha, Nikmatur, „Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian“, *Hikmah*, 14.1 (2017), 62-70
- Rohmah, Zaitun, and Prani Sastiono, „Pengaruh Kebijakan Peningkatan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Upah (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Di Jawa)“, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21.2 (2021), 7
- Sodiq, Amirus, „Konsep Kesejahteraan Dalam Islam“, *Equilibrium*, Springer, 2008.
- Statistik, website belajar matematika dan, „Common Effect Model (CEM)“, *Www.Jagostat.Com*, 2022
- Sudarsono, Blasius, „Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi“,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung=* : Alfabeta, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: CV Alfabeta*, 2008.
- Suriasumantri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tegela, Afini M, Dahliah Baharuddin, and Jamaluddin Kadir,
- Tilaar, Sonny, „Tinjauan Sebaran Lokasi Aglomerasi Industri Di Indonesia“, *Tekno*, 8.52 (2010)
- Tuasela, Antje, „Systematic Literature Review: Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi“, *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7.1 (2023), 392-98
- Ulfa, Rafika, „Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan“, *Al- Fathonah*, 1.1 (2021), 342-51
- Wibowo, Tri, „Ketimpangan Pendapatan Dan Middle Income Trap“,
- Yuliani, Tutik, „Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur“, *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 8.1 (2015)
- Zuliastri, Fikanti, Wiwiek Rindayati, and Alla Asmara, „Analisis Faktor Yang Memengaruhi Aglomerasi Industri Unggulan Daerah Dan Hubungannya Dengan Daya Saing Industri Daerah“, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2.2 (2013)